

EVALUASI PENATAAN KAWASAN TERMINAL SIMPANG AUR KUNING KOTA BUKITTINGGI

Oleh :

Nelma Netti

Email : nelma.netti29@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Chalid Sahuri, MS

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Terminal Simpang Aur Kuning of Bukittinggi city was included into class A type and build in 1983 next to Aur Kuning Market. At the beginning it had been functioned as it should be. However due to economic progression and street vendors activities, market expansion had become unavoidable. Therefore lesser spaces of terminal were remained. Meanwhile at the outside area of terminal had been build a kind of shadow terminal which taken a part of the road in front of SMA N 3 Bukittinggi. Based on those situations, researcher was attracted to study the area management of Terminal Simpang Aur Kuning of Bukittinggi city.

This research was conducted based on theories evaluation of William N Dunn. This theory study a policy based on six criteria of evaluation namely: affectivity, efficiency, adequacy, equalization, response and precision. This research was aimed to evaluate area management of Terminal Simpang Aur Kuning and all affecting factor. It used qualitative method and data studied descriptively. Data collection was carried out with interview, observation and documentation based on purposive sampling method and analyzed by triangulation technique.

The research result shown that area management of Terminal Simpang Aur Kuning of Bukittinggi city was not properly done and need to be improved with terminal expansion method. By considering limited area availability, local government was hoped to evict certain market (stores) building on terminal land, improving services by making certain needed infrastructures, improving human resources competency, good coordination with stake holders in order to reach good terminal management.

Key words: Policy, Evaluation, Terminal

PENDAHULUAN

Bukittinggi merupakan kota yang memiliki beragam potensi baik dalam bidang wisata, kuliner, serta sebagai pusat konveksi terbesar kedua di Indonesia. Dalam perkembangan kota Bukittinggi, ada beberapa kendala yang muncul yaitu kendala fisik maupun fungsi. Kendala fisik terkait dengan berbagai potensi bencana alam dikarenakan posisinya yang berada di lembah curam Ngarai Sianok dan kendala fungsi terkait dengan perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tujuannya. Perubahan fungsi lahan tersebut, salah satunya dapat dilihat dari penempatan kawasan sarana transportasi berupa terminal yang di perengaruhi oleh peningkatan perekonomian dan pertumbuhan penduduk dalam berbagai aktivitas sosial-ekonomi.

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 2005:4). Sedangkan untuk lancarnya pelaksanaan pengangkutan (transportasi), perlu adanya fasilitas seperti:

- a. Fasilitas operasi yaitu alat-alat angkutan serta perlengkapan tenaga penggerak, seperti gerobak, mobil, truk, kapal, kereta api.
- b. Jalan-jalan untuk tempat lewat kendaraan seperti jalan raya, dan rel-rel kereta api.
- c. Terminal, tempat kegiatan alat angkutan di mulai maupun sebagai tempat tujuan kegiatan tersebut seperti Terminal Bus, Pelabuhan Laut, dan Lapangan Udara (Gray, Clive, dkk, 2005: 1)

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Kemudian menurut jenisnya

terminal dapat bagi atas terminal tipe A, tipe B dan tipe C.

Bukittinggi memiliki satu terminal besar dengan kriteria tipe A yang terletak dikawasan Aur Kuning atau disebut juga dengan Terminal Simpang Aur Kuning. terminal ini dibangun pada tahun 1982 dan mulai dioperasikan pada tahun 1983. dengan luasnya yaitu ± 4 Ha. Dimana dalam pengadaannya dapat berfungsi sesuai tujuannya, dan memiliki fasilitas sesuai kebutuhannya, baik itu fasilitas utama maupun fasilitas penunjang. Seperti areal untuk angkutan kota, angkutan pedesaan, parkir kendaraan pengantar, jalur kedatangan, parkir tunggu dan keberangkatan bus angkutan antar provinsi (AKAP) dan angkutan dalam provinsi (AKDP).

Secara umum tujuan Terminal Simpang Aur Kuning adalah sebagai sarana pemberhentian angkutan umum, fasilitas keluar masuk dari objek-objek yang akan diangkut (penumpang maupun barang), sarana pelayanan umum (tempat pengendalian lalu lintas angkutan umum), serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan. Namun seiring perkembangan waktu serta pengaruh *Central Business Development (CBD)*, menimbulkan lajunya pertumbuhan pembangunan di sekitaran kawasan terminal meningkat, sehingga, ruko-ruko, toko dan kedai-kedai mulai berkembang. Hal itu tentu mengakibatkan dampak kepada terminal, terutama dalam luas kawasan terminal yang dulunya luas berubah menjadi sempit akibat desakan bangunan disekeliling kawasan terminal. Sebab pembangunan yang dilakukan tidak hanya memanfaatkan lahan kosong saja, tetapi juga memanfaatkan lahan terminal. Sehingga tingkat *aksebilitas* jalan dan daya tampung terminal berkurang serta terganggunya kegiatan di dalam terminal, terutama dalam hal penataan kawasan terminal, yaitu kurang teraturnya keadaan kendaraan yang keluar masuk terminal dan posisi parkir kendaraan yang ada di terminal tersebut.

Menurut Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa: Penentuan simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal penumpang tipe A yaitu dilakukan dengan memperhatikan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, Rencana Umum Tata Ruang, keterpaduan moda transportasi, jaringan trayek antar kota antar provinsi atau lintas batas negara, jarak antar terminal dan kelas jalan.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No 13 tahun 2012 tentang Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pasal 23 ayat 1 dijelaskan bahwa pengembangan sarana transportasi berupa terminal tipe A dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Lokasi terletak di PKN dan /atau di PKW /PKWp dalam jaringan trayek antar kota, antar provinsi (AKAP)
- b. Terletak di jalan arteri primer dengan kelas jalan minimum IIIA
- c. Jarak antara terminal regional tipe a sekurang-kurangnya 20 km
- d. Luas minimum 5 (lima) ha
- e. Mempunyai akses masuk atau keluar jalan dari terminal minimum 100 (seratus) meter; dan
- f. Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan AKAP, AKDP, Angkutan Perkotaan, serta Angkutan Pedesaan.

Menurut posisinya, Terminal Simpang Aur Kuning berada di kawasan pusat kota dan terletak secara strategis yaitu di persimpangan jalan

Selain permasalahan penyempitan lokasi terminal akibat pertumbuhan petokoan di sekeliling kawasan terminal, permasalahan juga terjadi di dalam area terminal yaitu kesemrawutan yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima (PKL) seperti lokasi loket dan ruang tunggu terminal yang seharusnya

sebagai tempat penjualan tiket dan tempat penumpang menunggu kendaraan dijadikan sebagai tempat penitipan barang dan pedagang makanan dan minuman, kemudian disekitaran pagar pembatas terminal dibentuk tenda-tenda kecil sebagai area lapak pedagang konveksi, dan tempat parkir kendaraan roda dua atau mobil pribadi,

Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi pasal 35 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa: Pengembangan terminal diarahkan untuk menunjang terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda, kelancaran pergerakan orang atau barang. Dan Penetapan terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pelayanan angkutan antar kota antar provinsi dan lokasi di wilayah Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dan dikembangkan di kawasan Tambo.

Kemudian diperjelas dalam pasal 36 ayat 1 yaitu: Rencana pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a diarahkan jaringan angkutan massal yang merupakan bagian terpadu dalam sistem transportasi perkotaan, menggabungkan dan atau mempertemukan berbagai jaringan angkutan massal dalam satu kesatuan jaringan yang saling melengkapi, mendukung, dan terpadu.

Selain di dalam terminal permasalahan juga terjadi di luar terminal yaitu adanya terminal bayangan yang dibentuk oleh para agen dengan memakan ruas jalan, tepatnya diruas jalan Muhammad Yamin atau di depan SMA Negeri 3 Kota Bukittinggi.

Padahal dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pasal 7 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa: (3) setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. (4)

setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan serta fenomena-fenomena yang peneliti temukan di lapangan, maka pada kesempatan ini peneliti tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul “Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian yang dituangkan dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi ?
2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengevaluasi penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi evaluasi penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi.

KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan melakukan penelitian tentang evaluasi penataan kawasan terminal dari segi ilmu pengetahuan dan manfaat praktis dalam analisis kebijakan terdapat beberapa manfaat yang diambil, baik dari dimensi teoritis maupun dari dimensi praktis manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Sebagai bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi

perkembangan Studi Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Bukittinggi serta Dinas-dinas terkait dalam melakukan Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi.
- b) Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama.

KONSEP TEORI

1. Kebijakan

Menurut **Eyestone** mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh **Dye** yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau dan tidak dilakukan (**Winarno, 2014:20**). Dalam mengartikan suatu kebijakan **Friendrich** dalam **Winarno (2012:20)** menyatakan kebijakan sebagai suatu arah atau tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dalam kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

2. Evaluasi Kebijakan

Menurut **Subarsono (2005:119)** evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut dengan evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna di

pertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sedangkan menurut **Dunn** dalam **Nugroho (2008:149)** ada beberapa kriteria evaluasi yaitu:

- a. Efektivitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- b. Efisiensi yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
- c. Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- d. Perataan (*equity*) yaitu berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan. Perataan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e. Responsivitas yaitu Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
- f. Kelayakan/ketepatan (*appropriateness*) yaitu kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi, dengan lokus penelitiannya yaitu Terminal Simpang Aur Kuning dan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Bukittinggi. Dipilihnya daerah ini disebabkan karena Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi merupakan dinas yang mengelola, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap fenomena-fenomena sosial dengan cara memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai evaluasi panataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang diteliti. Pemilihan *informan* dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan *informan* yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi, artinya subjek tersebut memahami dan menguasai permasalahan, dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun *informan* dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Bukittinggi

- b. Dinas Tata Ruang Kota dan wilayah Kota Bukittinggi
- c. BAPPEDA Kota Bukittinggi
- d. DPRD Kota Bukittinggi
- e. Dinas Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Kota Bukittinggi
- f. Kepala Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi
- g. Pengamat Perkotaan (transportasi) Kota Bukittinggi
- h. Masyarakat

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di dapat dari obyek penelitian atau *informan* penelitian yaitu berupa hasil wawancara yang mendalam dan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, mengenai penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning dengan informan penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber kedua atau secara tidak langsung melalui berbagai literatur baik dari buku, media massa (cetak atau elektronik), dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian, serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi atau kantor terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan menggunakan indra penglihatan terhadap objek penelitian yaitu Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Bukittinggi.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan peneliti dengan para informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi/data tentang penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi, serta hal-hal yang

menyangkut dengan perkembangan terminal tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan data dari dokumen yang ada di lokasi penelitian berupa arsip, foto-foto atau gambar informan dan aktivitasnya yang berguna untuk memperkuat data primer yang ada.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data atau informasi yang diperoleh dilapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. Semua hasil data tersebut di kumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai kegiatan *check*, *recheck* dan *crosscheck* dalam analisis data dengan hasil observasi penelitian yang dilakukan, kemudian dilakukan *crosscheck* melalui persepsi peneliti untuk dijadikan sebagai suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi

Menurut teori yang dikemukakan oleh William Dunn yaitu evaluasi yang dilihat berdasarkan 6 kriteria evaluasi kebijakan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektifitas kebijakan, berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan telah tercapai. Atau dengan kata lain melakukan penilaian dan penaksiran terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, apakah telah dilaksanakan, menghasilkan dampak sesuai dengan tujuan atau berdaya guna sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dari kriteria penempatan lokasi terminal di atas penempatan lokasi Terminal Simpang Aur Kuning masih jauh dari hal yang diharapkan. Dimana dalam hal kesesuaian lahan dengan tata ruangnya masih belum

tercapai, sebab saat sekarang ini lahan Terminal Simpang Aur Kuning telah mengalami penurunan kualitas lahan yang dulunya luas menjadi sempit akibat perkembangan perekonomian di sekitaran kawasan terminal berupa pertokoan karena posisi letak terminal yang berdekatan dengan pasar. Selain itu adanya pedagang kaki lima yang berjualan di lahan terminal, sehingga lahan yang seharusnya diperuntukan untuk terminal dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana transportasi di alih fungsikan sebagai sarana perdagangan.

Suatu kebijakan dapat terselenggara dengan efektif maka ada 2 indikator yang menjadi tolak ukur dalam pencapaiannya yaitu:

a. Tujuan Dari Sebuah Kebijakan

Tujuan adanya penataan terminal ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan akan sarana transportasi yang aman, nyaman produktif dan tertib sesuai dengan fungsinya yaitu tempat naik dan turunnya penumpang, bongkar muat barang, serta tempat pertukaran intra dan antar moda angkutan umum.

Penyelenggaraan penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning sudah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuannya. Dari pihak terminal itu sendiri telah berupaya melakukan penertiban dengan memberikan ketegasan kepada orang-orang yang melanggar aturan atau tidak menggunakan lahan terminal sebagaimana mestinya.

b. Sasaran Kebijakan

Sasaran dari penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi adalah tertatanya kawasan terminal sesuai dengan fungsinya, agar peningkatan pelayanan yang terjadi di dalamnya dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana terminal tersebut merasa aman, dan nyaman ketika mengunjungi terminal.

Sasaran penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning itu sendiri belum terlaksana dengan optimal, terutama dalam penertiban kendaraan yang belum sesuai trayeknya. Selain itu pengaturan keberangkatan dari kendaraan yang ada masih kurang teratur, sehingga kendaraan yang masuk dengan kendaraan yang keluar belum tertata dengan jelas dan rapi. Kemudian penerapan sistem pengaturan waktu keberangkatan di terminal belum terbentuk, oleh karena itu mengakibatkan penumpukkan kendaraan di kawasan terminal. Apabila kendaraan menumpuk di kawasan terminal maka akses gerak dan daya tampung terminal pun akan berkurang.

Sasaran penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning itu sendiri belum terlaksana dengan optimal, terutama dalam penertiban kendaraan yang belum sesuai trayeknya. Selain itu pengaturan keberangkatan dari kendaraan yang ada masih kurang teratur, sehingga kendaraan yang masuk dengan kendaraan yang keluar belum tertata dengan jelas dan rapi. Kemudian penerapan sistem pengaturan waktu keberangkatan di terminal belum terbentuk, oleh karena itu mengakibatkan penumpukkan kendaraan di kawasan terminal. Apabila kendaraan menumpuk di kawasan terminal maka akses gerak dan daya tampung terminal pun akan berkurang.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang diinginkan. Efisiensi kebijakan melihat beberapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan dan usaha-usaha apa saja yang semestinya dilakukan agar kebijakan tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Artinya melihat perbandingan antara *input* dengan *output* yang dilakukan terhadap kebijakan tersebut. Dalam efisiensi penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Dari segi Biaya

Biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan terminal Kota Bukittinggi diperkirakan sudah mencukupi dari target yang direncanakan, hanya saja untuk pengelolaan terminal simpang aur kuning belum terpenuhi sesuai dengan target yang diharapkan. Sehingga pelaksanaan penataan dan pengembangan terminal belum terlaksana sebagaimana mestinya.

b. Dari Segi Waktu

Bahwa pelaksanaan kebijakan penataan kawasan terminal simpang aur kuning belum terlaksana sesuai dengan waktunya, sehingga setelah ditetapkan perda tentang rencana tata ruang kota tersebut sampai dengan sekarang belum terselenggara dengan baik, dan pengembangan dari penataan kawasan terminal tersebut belum dilakukan, padahal perda tersebut telah berjalan selama 5 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh kendala-kendala yang terjadi di lapangan, sehingga pelaksanaannya belum terlealisasi di lapangan. Maka perda tersebut meski dikaji kembali agar tujuan yang direncanakan dapat mencapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Dari Segi Tenaga

Keterbatasan personil atau anggota pelaksana penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning masih kurang, sehingga mempengaruhi tindakan penataan yang dilakukan. Apabila dibandingkan dengan masyarakat yang melakukan kesalahan tentu sangat jauh dari harapan yang diharapkan, karena ketersediaan tenaga pelaksana untuk Terminal Simpang Aur Kuning itu harus banyak, sebab di terminal tersebut banyak sekali permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan tenaga yang kurang membuat penataan yang dilakukan menjadi kurang efektif.

3. Kecukupan

Kecukupan disini adalah berkaitan dengan tingkat efektivitas dari sebuah kebijakan. Apakah efektivitas ini dapat memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan

yang menimbulkan adanya masalah dalam kebijakan ini. Untuk itu di dalam suatu kebijakan harus ada alternatif-alternatif yang akan dilakukan apabila kebijakan ini telah diimplementasikan. Adapun indikator penilaiannya yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan dari Penataan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya, sehingga apabila dibandingkan dengan keadaan terminal yang sebelumnya telah mengalami kemajuan dari segi penataannya. Namun keadaan itu masih belum berjalan dengan sepenuhnya. Dimana dalam pelaksanaannya masih ada kendala-kendala berupa pedagang yang masih berjualan ketika aparat/personil yang menertibkan tidak ada di lapangan, begitu juga dengan penataan terminal yang terjadi di luar terminal.

b. Pengawasan Yang Dilakukan

Dalam suatu kebijakan harus ada pengawasannya agar kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang diharapkan. Apabila dikaitkan dengan Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi mengenai pengawasan kebijakan yang dilakukan bisa dikatakan sudah cukup baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi dirasa masih kurang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pengelolaan terminal tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terlihat dari keadaan terminal yang tidak mengalami kemajuan, melainkan kesemrawutan yang terjadi di kawasan terminal tersebut.

4. Perataan

Berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan. Artinya berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial suatu kebijakan yaitu dalam penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi yang dilihat dari akibat yang dihasilkan dengan usaha-usaha yang dilakukan

oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat terhadap penataan terminal tersebut. Untuk pelaksanaan penataan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kota Bukittinggi selaku badan yang telah diberi wewenang dalam pengurus transportasi kota.

Perataan akan penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi dengan melihat usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kelompok pengelola atau dinas-dinas terkait terhadap terminal tersebut dapat dikatakan sudah mulai terlaksana dengan baik. Dimana akibat yang diharapkan sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit, namun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih, agar penataan terminal tidak terbentuk hanya ketika dilakukan penataan oleh aparat saja, melainkan berkelanjutan sampai pada tahap yang diinginkan.

5. Responsivitas

Yang dimaksud dengan responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh dari suatu kebijakan dari Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target dari pelaksanaan Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi tersebut. Responsivitas ini akan melihat bagaimana tanggapan yang diberikan oleh masyarakat sebagai target dari kebijakan penataan yang dilakukan.

Responsivitas yang yang diberikan oleh target kebijakan belum sepenuhnya baik, terutama bagi para pelanggar peraturan yang masih belum bisa mengindahkan kebijakan yang dibuat. Akan tetapi bagi masyarakat sekitar sangat mendukung tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak pengelola terminal tersebut mengingat keadaan terminal yang sudah tidak sesuai lagi dengan fungsinya.

6. Ketepatan/kelayakan

Maksud dari ketepatan disini adalah mengenai apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai dan apakah kebijakan tepat untuk masyarakat baik yang memanfaatkan jasa terminal (penumpang) maupun yang memberikan jasa terminal (agen/Po) yang ada di kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi. Apabila dilihat dari keadaan terminal simpang aur kuning saat sekarang ini pelaksanaan penataan memang sangat dibutuhkan, akibat kesemrawutan yang terjadi di terminal. Sehingga terminal tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

Kemudian apabila dilihat dari perkembangan terminal dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan, baik dalam hal pengembangan kegiatan maupun dalam hal pembangunannya. Untuk itu berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya ketepatan/kelayakan terminal simpang aur kuning masih belum tepat dan perlu pengembangan dan peningkatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pembangunannya agar pelayanan transportasi dapat terlaksana dengan sebaik mungkin.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, adapun faktor yang mempengaruhi dalam Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

a. Pedagang

Dalam pelaksanaan penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi yang menjadi masalah utama di terminal adalah peningkatan jumlah pedagang yang ada di kawasan simpang aur kuning. Sebab pada dasarnya lokasi kawasan Terminal Simpang Aur Kuning memiliki lokasi yang berdekatan dengan kawasan pusat perdagangan konveksi terbesar di sumatera.

Sehingga daya tarik pedagang untuk berbondong-bondong berjualan ke simpang aur kuning menjadi meningkat, selain lebih ramai pembelinya juga sangat diminati oleh pedagang luar dalam memenuhi kebutuhan barang dasar baik itu kebutuhan konveksi, maupun hasil alam seperti sembako, sayur-sayuran, dan hasil-hasil produk Kota Bukittinggi lainnya.

Permasalahan kesembrawutan yang terjadi di kawasan Terminal Simpang Aur Kuning di sebabkan oleh peningkatan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan terminal tersebut. Dimana keadaan lokasi terminal yang sudah sempit sebagai lahan parkir kendaraan di tambah banyaknya jumlah pedagang yang numpang di lokasi tersebut membuat gerak dan pelaksanaan kegiatan di dalam terminal menjadi kurang efektif.

b. Ketersediaan Lahan

Dalam penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi kendala yang kedua yang menjadi masalahnya adalah ketersediaan lahan yang kurang memadai. Lahan merupakan sarana utama yang harus di perhatikan dalam melakukan kegiatan. Sebab segala aktivitas yang akan dilakukan pasti memerlukan tempat sebagai wadah dalam merealisasikan kegiatan. Penentuan kegiatan sesuai dengan lokasinya merupakan prinsip dasar dalam menempatkan kegiatan sesuai dengan fungsinya dan peranannya sehingga kegiatan yang ditempatkan tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Pengembangan terminal belum terlaksana sesuai dengan rencana yang diharapkan. Di karenakan ketersediaan lahan yang kurang memadai di Kota Bukittinggi. Kemudian dari segi persyaratan dan ketentuan belum tercukupi sebagaimana mestinya. Padahal secara lokasinya terminal tersebut memang harus dikembangkan, mengingat banyaknya kekurangan-kekurangan yang terjadi di terminal tersebut, terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana yang ada di

terminal belum tercukupi sesuai dengan kebutuhannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penataan kawasan terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa yang peneliti lakukan mengenai Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi yang dilihat dari 6 kriteria evaluasi yaitu (1) efektifitas, (2) efisiensi (3) kecukupan (4) perataan (5) responsivitas dan (6) ketepatan/kelayakan, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi sudah terlaksana. Namun dalam penyelenggaraannya belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Diketahui dari indikator efektifitas, penataan kawasan terminal simpang aur kuning belum terlaksana dengan efektif, karena belum tertatanya terminal dengan baik dan masih banyaknya kekurangan-kekurangan yang terbentuk di terminal tersebut.

Dilihat dari indikator efisien penataan kawasan terminal simpang aur kuning belum efisien, karena masih belum terselenggaranya pengembangan angkutan, serta belum tercapainya target-target dari kegiatan penataan dan pengawasan yang di rencanakan. Dilihat dari kecukupan yang diukur dari pelaksanaan dan pengawasan telah mulai dilakukan tetapi masih kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diinginkan, karena kurang optimalnya kegiatan di dalam terminal. Kemudian dari indikator perataan sudah mulai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja belum terbentuk secara maksimal, tetapi realisasinya sudah terlihat sedikit demi sedikit.

Dilihat dari responsivitas yang diberikan oleh target kebijakan belum sepenuhnya baik, terutama bagi para pelanggar peraturan yang masih belum bisa mengindahkan kebijakan

yang dibuat. Akan tetapi bagi masyarakat sekitar sangat mendukung tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak pengelola terminal. Sedangkan dilihat dari ketepatan/kelayakannya masih belum tepat dan perlu pengembangan dan peningkatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pembangunannya agar pelayanan transportasi dapat terlaksana dengan sebaik mungkin.

Jadi dengan keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa penataan kawasan terminal sudah berjalan dengan baik, hanya saja dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi oleh pihak-pihak pengelola, terutama dalam memback-up kegiatan di dalamnya baik dari segi penataannya, pemenuhan sarana dan prasarannya, maupun dalam segi pembangunannya yang dari waktu ke waktu belum mengalami perkembangan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan kawasan terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan di lapangan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penataan kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi yaitu: peningkatan jumlah pedagang tanpa izin yang berjualan di kawasan terminal, sebab posisi terminal yang dekat dengan pasar membuat daya tarik pedagang untuk berbondong-bondong berjualan di dekat terminal agar bisa merangkuh pembeli yang turun dari terminal secara langsung. Selain itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan lahan yang kurang memadai akibat telah sempitnya kawasan aur kuning oleh peningkatan kegiatan perekonomian di sekitaran aur kuning tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi dapat berfungsi

sebagaimana mestinya maka dibutuhkan pengembangan terminal dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada di terminal, kemudian Pemerintah hendaknya meningkatkan pembiayaan terminal melihat masih banyaknya kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam terminal. Sedangkan dalam pembangunan terminal hendaknya perlu dilakukan *modernisasi* sesuai dengan keadaan sekarang ini.

2. Seharusnya pedagang bisa memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku, untuk berjualan sesuai dengan lokasi yang telah disediakan. Sedangkan untuk mengatasi lokasi terminal yang sempit maka pemerintah daerah hendaknya bisa melakukan penertiban dan pembongkaran bangunan pertokoan yang memakai lahan terminal. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana terminal yang dapat terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah.
- Adisasmita, Rahardjo, 2008. *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Faried, Alam, Andi Syamsu dan Sastro M. Wanto, 2012. *Studi Analisa Kebijakan, Konsep, Teori, dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Clive, Simanjuntak, Payaman, dkk. 2005. *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardalis, 2002. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maleong, Lexy. J, 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Miro, Fidel. 2005. *Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Public dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Nugroho, Riant. 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- . 2008. *Public policy*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- . 2012. *Public policy*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, Herbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prabu, Anwar Mangkunegara. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Radar Jaya Offset
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service (CAPS).
- Dokumentasi:**
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Pasal 23 ayat 1.
- Perda No 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Dan Wilayah Kota Bukittinggi.
- Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Katentraman Dan Ketertiban Umum, Pasal 7 Ayat 3 dan 4.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi

Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe
A di Seluruh Indonesia pasal 2 ayat 1.

Sumber lain

Tria Anggraini, 2015. “Evaluasi Penataan Terminal Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi” : Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru.

Affiliate. 2014. Aur Kuning Harus Dikaji Kembali, Bukittinggi
(<http://ekspresnews.com/aur-kuning-harus-dikaji-kembali/v> dikutip pada 9 Juni 2014. Jam 12:13 WIB).